

PERWUJUDAN DESA RAMAH ANAK BERDASARKAN KEADILAN DAN SDGS Syofyan Hadi, Tomy Michael, Wiwik Afifah, Sultoni Fikri, Mega Dewi Ambarwati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: syofyan@untag-sby.ac.id, tomy@untag-sby.ac.id, wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Abstrak

Latar belakang yaitu munculnya desa bedahlawak merupakan desa yang identik dengan anak namun dalam perjalanan faktualnya muncul penolakan untuk meramu anak sebagaimana mestinya. Anak sebagai awal mula kebermulaan hidup harus mendapatkan perlindungan yang optimal. Metodologi menggunakan pendekatan ilmu hukum yang tidak hanya berkuat pada normatif namun adanya sosiologi hukum, empiris.[1] adapun data diperoleh dengan pengamatan langsung, survei serta wawancara. Hal ini dilakukan secara bertahap mulai dari penggalian data, hingga pelaporan tahap akhir. adanya tahapan ini akan menjadikan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan kapasitas pengurus BP pipa tentang konsep gender dan penanganan kasus di 21 Februari 2023 oleh Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan Untag Surabaya. koordinasi penyelesaian kasus yang ditangani bp pipa dan desa di balai desa 30 Maret 2023. Perencanaan pelatihan mediasi tingkat desa oleh kepala desa, sekretaris bp pipa dan BPD yang akan dilakukan Oktober 2023 serta pengurus bp pipa otomatis dijadikan pengurus pusat perlindungan perempuan dan anak tingkat desa sesuai Instruksi Kementerian PPPA, April 2023.

Kata Kunci: desa; keadilan; SDGS

Pendahuluan

Latar belakang yaitu munculnya Desa Bedahlawak merupakan desa yang identik dengan anak namun dalam perjalanan faktualnya muncul penolakan untuk meramu anak sebagaimana mestinya. Anak sebagai awal mula kebermulaan hidup harus mendapatkan perlindungan yang optimal.[2]

Metodologi

Metodologi menggunakan pendekatan ilmu hukum yang tidak hanya berkuat pada normatif namun adanya sosiologi hukum, empiris.[1] Adapun data diperoleh dengan pengamatan langsung, survei serta wawancara. Hal ini dilakukan secara bertahap mulai dari penggalian data, hingga pelaporan tahap akhir. Adanya tahapan ini akan menjadikan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.[3]

Hasil

Inovasi yang dihasilkan yaitu Festival perlindungan anak berbasis budaya dan partisipasi anak. Dimana festival ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai penanggung jawab terbuka sehingga dapat memobilisasi masyarakat. Festival mendukung SDGs Nomor 16.[4] Kemudian Balai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi (BP PIPA) Desa Bedahlawak adalah lembaga desa yang merupakan mitra kerja Pemerintah Desa Bedahlawak dalam upaya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan desa layak anak. Pada prinsipnya, setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijamin oleh orangtua, negara, dan masyarakat. BP PIPA Bedahlawak merupakan salah satu upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-hak dasarnya.[5] BP PIPA Bedahlawak terdiri dari kader-kader yang mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama. BP PIPA Desa Bedahlawak dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang ada yaitu masalah anak di desa, masalah keluarga dan perkawinan, ketiadaan informasi tentang penyelesaian kasus, layanan badan hukum dan psikologi yang jauh dari desa, sebagai bentuk komitmen desa bedahlawak sebagai desa layak anak, dan sebagai lembaga masyarakat untuk mewujudkan keadilan bagi anak dan korban. Buku saku ini berisi alur layanan, alur cara pelaporan atau konsultasi ke BP PIPA, dan berkas

yang diperlukan sebagai persyaratan untuk pelaporan atau konsultasi. Materi yang termuat dalam buku saku ini dijadikan acuan oleh kader BP PIPA dalam melaksanakan tugasnya.[4]

Edukasi hak anak, pengasuhan anak pasca perceraian, layanan BP PIPA, alur penanganan kasus melalui media leaflet dan buku saku. Definisi edukasi yaitu memberikan pemahaman secara langsung melalui Mahasiswa Untag Surabaya yang turut serta dimana menghasilkan luaran berupa buku antara lain berjudul Buku Saku Layanan BP PIPA Perlindungan Anak Desa Bedahlawak.[6] Adapun buku lainnya berjudul Desa Ramah Anak Dalam Bingkai Patriot Merah Putih [7] yang menunjukkan ciri khas Kampus Merah Putih milik Untag Surabaya. Penyusunan Peraturan Desa tentang Desa Layak Anak sebagai rangkaian program Matching Fund yang dilaksanakan oleh Tim Fakultas Hukum Untag Surabaya bekerja sama dengan Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu indikator desa layak anak yaitu penguatan kelembagaan. Kegiatan yang dilakukan pada 5 Oktober 2022 di Balai Desa Bedahlawak dihadiri langsung oleh Kepala Desa Bedahlawak, Aparatur Desa Bedahlawak, Badan Permusyawaratan Desa Bedahlawak serta masyarakat Desa Bedahlawak. Narasumber kegiatan yaitu Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H mengatakan jika Peraturan Desa Tentang Desa Layak Anak harus disahkan karena sebagai bentuk pemenuhan salah satu indikator desa layak anak dan menjadi dasar hukum dibentuknya BP PIPA sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemenuhan hak anak serta mewujudkan Desa Layak Anak. Kegiatan ini dipandu oleh Faradiba Aprillia F selaku MC dan Leony Fatmawati sebagai moderator.[8]

Kemudian luaran-luaran itu juga disesuaikan dengan konversi mata kuliah terkait seperti alur proses pidana yang dapat dipahami dengan baik melalui video.[9] Komunitas yang menjadi perhatian dalam meningkatkan desa ramah anak ini juga didukung oleh Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur yang termasuk mitra pelaksana bersama Untag Surabaya.[10] selain itu ada pelantikan BP PIPA oleh Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur.[11] Inovasi lainnya yaitu alat peraga edukasi "Spin Your Problem" dan alat peraga edukasi "Ular Tangga Perlindungan Anak".

Keunggulan yaitu terbangun sistem perlindungan anak berbasis komunitas yaitu desa ramah anak dengan kelembagaan yang dilegalkan melalui peraturan desa.[12]

Kesimpulan

Penguatan kapasitas pengurus BP PIPA tentang konsep gender dan penanganan kasus di 21 Februari 2023 oleh Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur dan Untag Surabaya. Koordinasi penyelesaian kasus yang ditangani BP PIPA dan desa di balai desa 30 Maret 2023. Perencanaan pelatihan mediasi tingkat desa oleh kepala desa, sekretaris BP PIPA dan BPD yang akan dilakukan Oktober 2023 serta Pengurus BP PIPA otomatis dijadikan pengurus Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat desa sesuai instruksi Kementerian PPPA, April 2023.

Daftar Pustaka

- [1] T. Michael, "Unraveling the Importance of Democracy in Formation Legislation," *International Journal of Social Science Research and Review*, vol. 5, no. 4, pp. 20-24, Apr. 2022, doi: 10.47814/IJSSRR.V5I4.254.
- [2] E. D. Kurnia *et al.*, "Legal arrangements on post divorce child custodial," *Technium Social Sciences Journal*, vol. 37, pp. 211-215, Nov. 2022, doi: 10.47577/TSSJ.V37I1.7681.
- [3] T. Michael, *Metode Penelitian: Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis*. 2013.

- [4] "Pembentukan BP PIPA Mencegah Maraknya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak - Kompasiana.com." Accessed: Jun. 30, 2023. [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/edogawa091482/63afc87f08a8b545ed412633/mbkm-matching-fund-pembentukan-bp-pipa-mencegah-maraknya-kekerasan-kepada-perempuan-dan-anak-desa-bedahlawak>
- [5] T. Michael, "Dumpster Diving Threat In Personal Data Leakage Case In Indonesia Social Contracts Undertaken by the State in Post-Pandemic," *Operations Research: International Conference Series*, vol. 4, no. 2, pp. 60-64, Jun. 2023, doi: 10.47194/orics.v4i2.225.
- [6] "Ilmu Hukum Untag Surabaya." Accessed: Jun. 30, 2023. [Online]. Available: <https://hukum.untag-sby.ac.id/berita-2648-buku-saku-layanan-bp-pipa-perindungan-anak-desa-bedahlawak.html>
- [7] "LPPM Untag Surabaya." Accessed: Jun. 30, 2023. [Online]. Available: <https://lppm.untag-sby.ac.id/berita-1672-buku-matching-fund-fh-untag-surabaya-di-desa-bedahlawak-jombang-berjudul-desa-ramah-anak-dalam-bingkai-patriot-merah-putih.html>
- [8] Ilmu Hukum Untag Surabaya, "Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Layak Anak Sebagai Rangkaian Program Matching Fund," <https://hukum.untag-sby.ac.id/berita-2626-penyusunan-peraturan-desa-tentang-desa-layak-anak-sebagai-rangkaian-program-matching-fund.html>.
- [9] "Luaran Magang MBKM UNTAG Surabaya tentang Alur Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya - YouTube." Accessed: Jun. 30, 2023. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=NCQzU6XVcM4>
- [10] Muhammad Firmansyah, Tamara Sujarwo Putri, Dipo Wahjono Haryono, Muhammad Jufri Ahmad, Abraham Ferry Rosando, and I Gusti Ayu Agung Noviekayati, "Establishing a child-friendly village as a form of community awareness protection of child rights in Bedahlawak Village," *Technium Social Sciences Journal*, vol. 36, 2022, doi: 10.47577/tssj.v36i1.7463.
- [11] Ilmu Hukum Untag Surabaya, "Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Jombang Melantik Pengurus Balai Perempuan Pusat Informasi," <https://hukum.untag-sby.ac.id/berita-2635-koalisi-perempuan-indonesia-kpi-cabang-jombang-melantik-pengurus-balai-perempuan-pusat-informasi-.html>.
- [12] M. Nurul Jadid and T. Michael, "'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA', YUSTISI, vol. 10, no. 1, pp. 175-184, Feb. 2023."